

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR
TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PROSES PENGAUDITAN
(Studi Empiris Pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AFRA ERMAN
2006 / 73410

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH INDEPENDENSI DAN
PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP
PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PROSES PENGAUDITAN PADA AUDITOR
BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU

NAMA : AFRA ERMAN

BP/NIM : 2006/73410

KEAHLIAN : AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

Nip. 19580519 199001 1 001

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Nip. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Nip. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus
Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap
Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan
(Studi Empiris pada Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)**

**Nama : Afra Erman
BP/NIM : 2006/73410
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Agustus 2010

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. _____
2.	Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. _____
3.	Anggota	Lili Anita, S.E, M.Si, Ak	3. _____
4.	Anggota	Eka Fauzihardani, S.E, M.Si, Ak	4. _____

ABSTRAK

AFRA ERMAN. (2006/73410). Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak
II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang sejauh mana (1) pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan, (2) pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau yang berjumlah 46 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* untuk mendapatkan sampel sehingga semua populasi yang berjumlah 46 orang dijadikan sampel. Sumber data adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung ke BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan sebagai variabel terikat, independensi dan profesionalisme auditor sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Hipotesis 1 ditolak yaitu independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,451 < 1,7011$ (2) Hipotesis 2 diterima yaitu profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,224 > 1,7011$.

Saran dalam penelitian ini antara lain (1) Auditor hendaknya bebas mengkomunikasikan hasil audit yang ditemukan kepada pihak manajerial sesuai fakta yang diperoleh. Independensi Auditor perlu ditingkatkan agar dalam mempertimbangkan tingkat materialitas selama proses pengauditan berlangsung, auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada pihak manapun, (2) Profesi eksternal auditor merupakan salah satu profesi yang menciptakan transparansi dalam masyarakat, sehingga diharapkan para auditor meningkatkan kemampuan profesionalnya guna mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan kliennya, (3) Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan, serta sampel dalam penelitian dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan". Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I sekaligus penasehat akademik, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak selaku dosen penelaah proposal penelitian atas masukannya pada seminar proposal penelitian.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh auditor pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Teristimewa buat kedua orang tuaku Erman, Spd, Jismaini, SE, dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2006 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Tingkat Materialitas Proses Pengauditan	13

a. Pengertian	13
b. Pertimbangan Awal Materialitas	15
c. Penggunaan Materialitas Dalam Mengevaluasi Bukti Audit	19
d. Pentingnya Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Audit	20
2. Independensi Auditor	22
a. Pengertian	22
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor	23
c. Pentingnya Independensi Auditor	25
d. Gangguan Terhadap Independensi Auditor	27
3. Profesionalisme Auditor	29
a. Pengabdian Pada Profesi	29
b. Kewajiban Sosial	30
c. Kemandirian	31
d. Hubungan Dengan Sesama Profesi	32
e. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi	32
4. Penelitian yang Relevan	35
B. Kerangka konseptual	36
C. Hipotesis	39
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40

B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Variabel Penelitian	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	45
1. Uji Validitas	45
2. Uji Reliabilitas	46
H. Uji Asumsi Klasik	55
1. Uji Normalitas	55
2. Uji Heteroskedastisitas	56
3. Uji Multikolinearitas	56
I. Teknik Analisis Data	56
1. Analisis Deskriptif	56
2. Metode Analisis	58
3. Uji Hipotesis	58
J. Definisi Operasional	60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Temuan	62
1. Gambaran Umum Objek penelitian	62
2. Deskriptif Data Responden	63
3. Demografi responden	64
B. Deskriptif Hasil Penelitian	67

C. Analisis Data	74
1. Uji Asumsi Klasik	74
2. Hasil Penelitian	77
D. Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Keterbatasan	88
C. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skala Pengukuran	43
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	44
3. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	62
4. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
5. Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Pengalaman Kerja	64
6. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Kursus yang Pernah Diikuti.....	65
7. Jumlah Responden Berdasarkan jumlah Kursus yang Pernah Diikuti.....	65
8. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Kursus yang Pernah Diikuti....	66
9. Distribusi Frekuensi Independensi Auditor	67
10. Distribusi Frekuensi Profesionalisme Auditor	69
11. Distribusi Frekuensi Pertimbangan Tingkat Materialitas	73
12. Uji Normalitas	76
13. Uji Heteroskedastisitas	77
14. Uji Multikolinearitas	78
15. Adjusted R Square	79
16. Koefisien Regresi Berganda	80
17. Uji F	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahap Dalam Penetapan Materialitas	14
2. Kerangka Konseptual	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penelitian	93
2. Kuesioner Penelitian	95
3. Tabulasi Data <i>Pilot Test</i>	101
4. Tabulasi Data Penelitian	104
5. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	107
6. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	112
7. Uji Asumsi Klasik	118
8. Analisis Data	112
9. Uji F	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha membuat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak internal perusahaan, tetapi telah meluas kepada pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditor. Sebagai pihak eksternal, investor dan kreditor hanya dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, jasa auditor sangat dibutuhkan dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Auditor adalah pihak yang diyakini berperan sebagai pengontrol dan menjaga kepentingan publik di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam melaksanakan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas terlebih dahulu. Materialitas adalah seberapa salah saji informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang sedang terjadi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang memiliki kepercayaan terhadap informasi tersebut (Mulyadi, 2002:158). Auditor sering menemui kesulitan dalam menetapkan jumlah tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan kliennya, karena auditor sulit mempertimbangkan apakah suatu akun memiliki masalah lebih saji atau kurang saji, karena tidak ada suatu pedoman khusus yang

memungkinkan auditor memutuskan kapan suatu hal dianggap tidak material, material, dan sangat material .

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bahan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang meliputi semua aspek proses pengauditan atas laporan keuangan. Menurut SPAP (2001:312) dalam M.Dan (2002), risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam (1) perencanaan audit, dan (2) penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia. Menurut Mulyadi (2002:158), tingkat materialitas berpengaruh langsung terhadap jenis opini yang diterbitkan. Dalam penerapannya, merupakan suatu pertimbangan yang cukup sulit untuk memutuskan berapa materialitas sebenarnya karena tidak terdapat suatu panduan yang sederhana dan terstruktur yang dapat menolong seorang auditor untuk memutuskan apakah sesuatu hal bersifat tidak material, material atau sangat material.

Menurut Arens dalam (Hastuti, 2003), kecukupan bahan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan oleh auditor, karena diperlukan lebih banyak bahan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bagi auditor. Dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan

auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada kliennya, karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi secara keseluruhan, namun auditor hanya dapat memberikan keyakinan kepada klien atas laporan keuangan auditannya.

Dengan adanya kegiatan pemeriksaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat, hendaknya dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dari entitas yang diaudit sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan Negara (SPKN, 2007). Dengan demikian dapat dilihat, apabila semua kegiatan pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor secara profesional dan independen, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan suatu usaha tidak akan sama dengan usaha yang lain tergantung pada ukuran usaha tersebut (Messier, 2006:124).

Masyarakat mengharapkan akuntan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen, karena dalam melaksanakan proses audit auditor kemungkinan akan menemukan kesalahan yang mungkin disengaja maupun yang tidak disengaja dalam laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian), sehingga diharapkan para pemakai dapat yakin bahwa hasil pengauditan bebas dari salah saji yang material. Independensi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya (Boynton, 2002:66). Auditor independen dalam tugasnya mengaudit usaha klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga, supaya melaporkan dengan sejujurnya

keadaan yang terjadi tanpa adanya manipulasi data. Peran auditor sebagai pihak yang independen sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi laporan keuangan. Auditor yang independen akan dapat menentukan dengan baik seberapa besar tingkat materialitas yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan audit. Independensi terkait dengan kualitas mutu pribadi auditor dan melekat pada diri pribadi auditor. Pengaruh budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi auditor akan mempengaruhi sikap independensinya.

Dalam menetapkan tingkat materialitas dari suatu akun yang terdapat dalam laporan keuangan, auditor yang independen akan bersikap objektif serta tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain, supaya hasil laporan keuangan auditan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (SPKN, 2007). Apabila auditor ditetapkan tidak memiliki independensi menurut peraturan Kode Perilaku Profesional, maka akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Persyaratan ini mencerminkan pentingnya independensi bagi para auditor, karena setiap penyimpangan dari aturan independensi ini akan dianggap sangat material dan berpengaruh pada jenis pendapat yang akan diterbitkan (Arens, 2008:73). Sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan, auditor hendaknya mampu menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan auditannya. Oleh karena itu, seorang auditor tidak hanya perlu memiliki kompetensi dan keahlian saja, tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak akan percaya akan hasil auditan dari auditor, sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa

pengauditan dari auditor. Artinya, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono dalam Elfitria, 2007).

Apabila ditemukan salah saji yang material, seorang auditor yang independen harus memberitahukan kepada klien, supaya koreksi dapat dilakukan. Namun apabila klien menolak untuk mengoreksi laporan tersebut, pendapat dengan pengecualian atau tidak wajar harus diberikan. Oleh karena itu, auditor yang independen harus bersikap jujur dalam pelaksanaan pengauditan. Profesi akuntan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dari berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi tingkat independensi auditor. Namun seorang akuntan yang independen akan memberikan pendapat sesuai dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan (Mulyadi dalam Eunike, 2007).

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional (Arens, 2008:320). Artinya, walaupun terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh), maka salah saji tersebut dianggap wajar sehingga dapat disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sikap profesionalisme yang tinggi sangat dibutuhkan seorang auditor untuk menentukan seberapa besar

jumlah materialitas yang akan ditetapkan, baik dengan menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga dengan profesionalisme auditor yang semakin tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan tingkat materialitas semakin baik pula.

Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan (M.Dan, 2002:58). Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor. Menurut Hall (1968) dalam Hastuti,dkk (2003), Elfitria (2007), dan Ristyo (2007), gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan kedalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan sesama profesi.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan yang profesional, auditor harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku sesuai dengan kode perilaku profesional, maka auditor dalam melaksanakan audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit akan meningkat jika standar kerja dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif sesuai dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Sebagai auditor yang profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional, maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit.

Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Seorang akuntan dalam melaksanakan proses pengauditan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil pengauditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan dituntut untuk lebih profesional dalam pelaksanaan proses pengauditan. Akuntan mendapat kepercayaan dari klien dan *stakeholders* untuk membuktikan kewajaran proses pengauditan yang akan disajikan oleh klien (Messier, 2006:53). Auditor yang profesional akan melaksanakan proses audit sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, supaya laporan keuangan yang akan disajikan akan bebas dari salah saji yang material, karena dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak internal dan eksternal perusahaan.

Seorang auditor yang profesional memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi kepercayaan masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, tidak dibawah tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang kualitas dirinya akan selalu dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama-sama tahu dan paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi

dengan sesame profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik.

Berharap hasil pemeriksaannya lebih berkualitas, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mengeluarkan suatu standar audit yang berlaku yaitu peraturan BPK No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Peraturan ini merupakan peraturan pertama mengenai SPKN yang dikeluarkan BPK sejak berdiri 60 tahun yang lalu. SPKN merupakan pelengkap untuk memperkuat standarisasi pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam paket ketiga (terakhir) UU tentang Keuangan Negara tahun 2002-2003. SPKN merupakan pedoman oleh BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini bertujuan supaya hasil auditnya dapat dijadikan landasan kepercayaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta menghasilkan audit yang berkualitas. Posisi SPKN setara dengan peraturan pemerintah dan merupakan bagian hukum positif yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan terbitnya peraturan ini, maka menunjukkan adanya *fairness* dalam proses audit.

Kasus yang terjadi di Indonesia yakni berturut-turut tiga tahun terakhir (2006,2007 dan 2008) opini BPK atas laporan keuangan Porli selalu disclaimer. Ada 4 opini atas laporan keuangan yaitu: (1) wajar tanpa pengecualian (2) wajar dengan pengecualian (3) tidak wajar dan (4) tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Opini disclaimer menunjukkan adanya kelemahan mendasar dengan kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam memberikan opini atas laporan keuangan, BPK menentukan tingkat materialitas. Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan tingkat materialitas awal yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan yaitu sebesar 0,5% dari total realisasi belanja. Selanjutnya untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir (Tolerable Error) yaitu sebesar 50% dari pertimbangan materialitas atau berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko masing-masing akun. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum. Faktor penyebab laporan keuangan Polri disclaimer yakni: (1) sistem pengendalian intern yang tidak memadai pada aspek aset tetap, persediaan, barang bukti, dana non APBN, (2) kurangnya implementasi dari Action Plan yang dibuat dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan Polri, (3) kuantitas dan kualitas SDM belum memadai, (4) Tidak ada review laporan keuangan pada semua unit akuntansi. Auditor melihat banyaknya terjadi kesalahan penyajian yang material pada laporan keuangan Polri, sehingga menyebabkan Polri mendapat opini *disclaimer*. Hal ini terjadi karena, adanya penghilangan informasi yang diperlukan oleh auditor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hastuti,dkk (2003) yang mengambil sampel penelitian di Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elfitria (2007) yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit laporan keuangan pada KAP kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dalam dimensi

pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan profesionalisme auditor dalam dimensi hubungan dengan sesama profesi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Ristyo (2007) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni independensi auditor dan penelitian dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Hal ini penting untuk diteliti mengingat seorang akuntan bisa saja tidak independen dan profesional dalam menentukan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Penelitian ini akan menguji sejauhmana pengaruh independensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan. Peneliti memilih untuk meneliti dua faktor tersebut karena independensi dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang auditor guna mewujudkan laporan audit yang dapat dipercaya. Objek penelitian ini adalah BPK RI Perwakilan Wilayah Riau.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan** terutama pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.
3. Apakah ada pengaruh materialitas terhadap banyaknya bukti audit yang diperlukan.
4. Apakah terdapat pengaruh materialitas terhadap bentuk laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diungkapkan, maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada independensi dan profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK Perwakilan Riau ?
2. Sejauh mana profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK Perwakilan Riau ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK Perwakilan Riau.
2. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK Perwakilan Riau.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti.

2. Bagi auditor dan calon auditor.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan audit laporan keuangan terutama dari segi pertimbangan tingkat materialitasnya, serta dapat meningkatkan sikap profesionalisme dan independensi dalam proses pengauditan.

3. Bagi pembaca dan peneliti lain.

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagian bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh independensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pertimbangan Tingkat Materialitas Proses Pengauditan

a. Pengertian Materialitas

Menurut *Financial Accounting Standards Board* 2 dalam Arens (2008:218), materialitas adalah :

Besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.

Menurut Mulyadi (2002:158), materialitas adalah :

Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji.

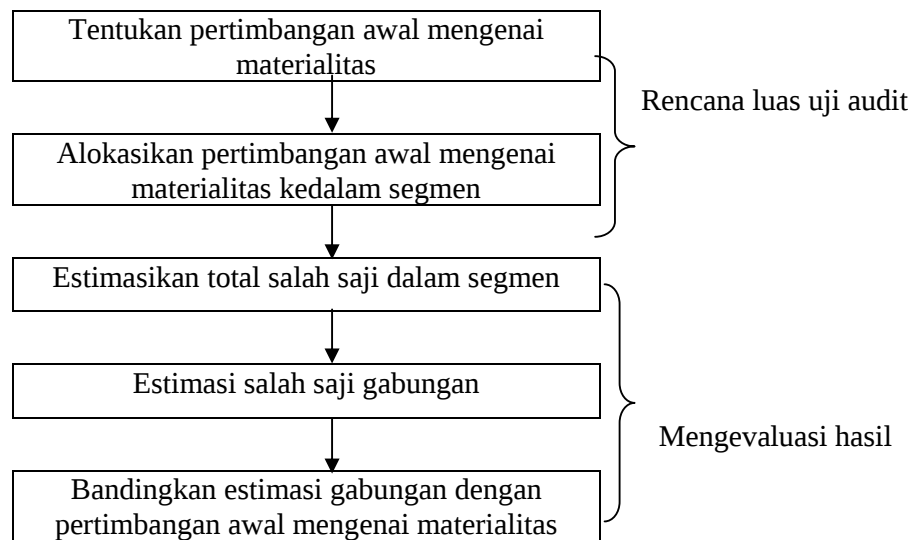
Menurut Messier (2005:20), materialitas adalah :

Tingkat penghapusan atau salah saji informasi akuntansi, yang berhubungan dengan kondisi sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh dengan penghapusan atau salah saji tersebut.

Dari beberapa definisi materialitas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa materialitas yaitu berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya salah saji tersebut. Sedangkan, pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan untuk menentukan seberapa besar salah saji yang terjadi dalam suatu laporan

keuangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas penyajian laporan keuangan. Materialitas secara umum merupakan pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan.

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Menurut Arens (2008:318), ada lima tahap dalam penetapan materialitas yaitu :



Gambar 1
Tahap dalam Penetapan Materialitas

Dapat kita lihat bahwa pertimbangan tingkat materialitas tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan audit, namun juga dalam pelaksanaan audit dan pertimbangan jenis laporan audit yang akan dikeluarkan oleh auditor.

b. Pertimbangan Awal Tentang Materialitas

Auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah satu atau lebih kesalahan dalam laporan keuangan yang dipandang akan memadai (Arens, 2008:319). Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah satu atau lebih kesalahan dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan terpenting yang diambil auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

Penetapan tingkat materialitas dalam praktiknya sangat sulit ditetapkan oleh auditor (Arens dalam Muhadi, 2008). Dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan dibuat auditor harus mengandalkan laporan keuangan, serta auditor harus memiliki pengetahuan mengenai siapa saja pemakai laporan keuangan klien. Dalam praktiknya, para auditor mungkin tidak mengetahui siapa saja pemakai laporan atau keputusan apa yang akan mereka ambil berdasarkan laporan keuangan itu.

Pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum yang diyakini auditor bahwa terdapat salah satu atau lebih kesalahan dalam laporan keuangan dan masih tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Alasan auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat (Arens, 2008:322). Dalam pelaksanaan audit, auditor sering kali mengubah

pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Auditor mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan, karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil.

Pertimbangan awal materialitas dapat didasarkan atas data laporan keuangan yang dibuat tahunan. Sebagai alternative, pertimbangan tersebut dapat didasarkan atas laporan keuangan satu tahun yang lalu atau lebih, yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti keadaan ekonomi atau trend industri (Mulyadi, 2002:161). Berikut ini disajikan contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materialitas (Mulyadi, 2002:156).

- 1) Hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti
 - a) Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan.
 - b) Total aktiva dalam neraca.
 - c) Total aktiva lancar dalam neraca.
 - d) Total ekuitas pemegang saham dalam neraca.
- 2) Faktor kualitatif, seperti :
 - a) Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum.
 - b) Kemungkinan terjadinya ketidakberesan.
 - c) Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk memperoleh beberapa ratio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Kesalahan penyajian yang

kecil dapat bersifat material jika terdapat kemungkinan timbulnya berbagai konsekuensi atas sejumlah kewajiban kontrak.

- d) Adanya gangguan dalam *trend* laba. Kesalahan penyajian yang sebenarnya tidak material dapat berubah menjadi material jika kesalahan penyajian tersebut mempengaruhi *trend* pendapatan.
- e) Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.

Menurut Boynton (2006:331) dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini :

1) Materialitas pada tingkat pelaporan keuangan

Auditor menggunakan dua cara dalam menetapkan materialitas yaitu perencanaan audit dan saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi material karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan keuangan berisi kekeliruan atau ketidakkonsistenan yang berdampak secara individual atau secara gabungan, sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2) Materialitas pada tingkat saldo akun

Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep material pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur

adukkan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah ukuran saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep material berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual, namun jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasikan akun tersebut. Ada tiga kesulitan dalam mengalokasikan materialitas dalam akun (segmen) neraca (Arens, 2008:320) yaitu :

- 1) Auditor menganggap akun tertentu lebih banyak kekeliruan dari yang lain.
- 2) Perlunya pertimbangan lebih saji atau kurang saji.
- 3) Biaya audit relatif yang mempengaruhi alokasi.

Meskipun diperlukan ketepatan alokasi materialitas laporan keuangan ke akun, analisis akhir proses alokasi tersebut sangat tergantung pada pertimbangan subjektif auditor (Mulyadi, 2002:159). Berdasarkan hasil dari prosedur audit yang dilaksanakan, auditor menjumlahkan salah saji di tiap akun transaksi. Auditor membandingkan total salah saji

(kemungkinan salah saji) dengan pertimbangan awal mengenai materialitas (Messier,2005:131). Pertimbangan awal mengenai materialitas bisa berbeda dari pertimbangan materialitas yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus menjelaskan alasan-alasan untuk merevisi pertimbangan awal mengenai materialitas.

Jika kemungkinan salah saji kurang dari pada pertimbangan awal mengenai materialitas, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Sebaliknya, jika kemungkinan salah saji lebih besar dari pada pertimbangan yang direncanakan mengenai materialitas, auditor harus meminta klien untuk menyesuaikan laporan keuangan. Jika klien menolak untuk menyesuaikan salah saji tersebut, auditor harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai GAAP.

c. Penggunaan Materialitas dalam Mengevaluasi Bukti Audit

Jika pada tahap perencanaan audit, auditor menaksir bahwa salah saji Rp 8.000.000,- dipandang material untuk total aktiva, jumlah ini kemudian dipakai oleh auditor untuk mengevaluasi bukti audit yang dikumpulkan dalam membuktikan berbagai asersi yang terkandung dalam akun-akun aktiva dalam neraca. Misalnya, auditor menemukan salah saji sebesar Rp 3.000.000,- dalam akun persediaan dan terdapat berbagai kekeliruan yang ditemukan dalam audit atas berbagai akun yang termasuk dalam kelompok aktiva jumlah salah saji Rp 11.000.000,-. Bagaimana

kesimpulan auditor tentang materialitas. Menurut Mulyadi (2002:160) ada dua kemungkinan yang ditempuh oleh auditor yakni :

- 1) Dengan berbagai alasan tertentu, auditor dapat menaikkan batas materialitas. Kemungkinan disebabkan jumlah aktiva yang dipakai sebagai dasar penentuan materialitas pada tahap perencanaan berbeda dengan jumlah aktiva yang terdapat dalam laporan keuangan akhir, sehingga persentase materialitas diterapkan pada jumlah yang berbeda.
- 2) Auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan sebahagian tidak disajikan secara wajar karena salah saji Rp 11.000.000,- melebihi jumlah materialitas Rp 8.000.000,-. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tingkat materialitas ini, auditor dapat meyakini kliennya untuk melakukan koreksi atas jumlah salah saji yang terdapat dalam akun-akun yang bersangkutan.

d. Pentingnya Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Audit

Materialitas merupakan unsur penting dalam merencanakan proses audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan dalam audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas dalam proses audit. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang proses pengauditan laporan keuangan yang akan dilakukan. Materialitas merupakan kesalahan dalam penyajian yang dapat mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan. Jika suatu kesalahan bersifat material maka hal itu akan berdampak besar bagi hasil

audit dalam perusahaan. Tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian yang material. Didalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini (Mulyadi, 2002:158) :

- 1) Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkaskan, digolongkan dan dikompilasi.
- 2) Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan klien.
- 3) Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidak beresan.

Materialitas mengharuskan auditor mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan usaha maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi atas hasil auditan. Dalam menetapkan tingkat materialitas dapat digunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, yakni antara lain :

- 1) Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan.
- 2) Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji

didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Dalam hal ini auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian.

- 3) Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi jika terjadi para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar, tergantung dari kondisi yang ada.

2. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi Auditor

Pengertian independensi menurut Arens (2008:124) yaitu :

Mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan uji audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit.

Pengertian independensi menurut Mulyadi (2002:26) yaitu :

Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Pengertian independensi menurut Boynton (2002:66) yaitu :

Merupakan dasar dari profesi auditing, dimana auditor akan bersikap netral dan objektif terhadap entitas.

Pengertian independensi menurut Messier (2005:53) yaitu :

Tingkat objektivitas secara fakta dan lahiriah, termasuk ketiadaan konflik kepentingan yang signifikan.

Dari beberapa definisi mengenai independensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bahan bukti yang ada, sehingga menciptakan kualitas laporan audit yang baik, artinya akuntan tidak mudah dipengaruhi dan tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Independensi ini merupakan hal yang unik di dalam profesi akuntan publik (Kusharyanti dalam Eunike,2007). Auditor dituntut untuk memenuhi keinginan kliennya, karena klienlah yang membayar *fee* jasa yang disediakan oleh auditor tersebut. Di lain pihak, auditor harus independen dari kliennya. Petunjuk pelaksanaan mengenai independensi ini telah dikeluarkan oleh IAI dalam Pernyataan Etika Profesi No.1 *Integritas, Objektivitas, dan Independensi*. Menurut Mulyadi (2002 :52) dalam contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik diklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor :

- 1) Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien. Hubungan keluarga dan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas dan mengancam independensi.
- 2) Besar audit *fee* yang dibayar oleh klien tertentu. Besar audit *fee* dapat berbeda-beda tergantung pada resiko penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan, dan pertimbangan profesional lainnya. Akuntan tidak

boleh mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* jauh lebih rendah.

- 3) Hubungan usaha dan keuangan dengan klien. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi seorang auditor dan mempengaruhi objektivitas auditor.
- 4) Pemberian fasilitas dan bingkisan (*gifts*) oleh klien. Seorang klien yang memberikan fasilitas dari *gifts* kepada auditor yang melakukan audit di perusahaannya bisa mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya para investor mereka akan menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada dibawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan.
- 5) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai. Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dan mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional.
- 6) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Contoh berikut ini menyebabkan auditor tidak independen, auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit atas laporan keuangan klien tersebut.

c. Pentingnya Independensi Auditor

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh seorang akuntan. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut.

Standar umum yang kedua tentang profesionalisme akuntan publik mengatur sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Artinya seorang auditor harus bebas dari pengaruh orang lain serta tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Seorang auditor yang independen akan memiliki kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Menurut Mulyadi (2002:79), sikap mental independen tersebut meliputi :

1) Independen dalam fakta/kenyataan (*independen in fact*)

Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam melaksanakan proses pengauditan. Independensi sikap mental sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berhubungan dengan diri pribadi seorang auditor.

2) Independen dalam penampilan (*independen in appearance*).

Independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit, yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya.

Kode etik akuntan publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Alderman dalam Ari,2008). Nilai auditing sangat berpengaruh pada persepsi publik atas independensi auditor. Menurut Mulyadi (2002:129) sebelum auditor melaksanakan kegiatan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dengan baik dan menyusun laporan auditnya secara cermat dan seksama. Kecermatan dan kemahiran serta profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit, yakni :

- 1) Penentuan waktu perikatan.

Pada umumnya waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara cermat dan seksama pelaksanaan audit adalah enam sampai

sembilan bulan sebelum akhir tahun buku klien. Apabila waktu perikatan audit telah disetujui oleh auditor, maka auditor harus melakukan penugasan audit dengan cermat dan teliti.

2) Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan.

Auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan kedalam dua jenis, yaitu :

- a) Pekerjaan interim (*interim work*) adalah pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor tiga sampai empat bulan sebelum tanggal neraca.
- b) Pekerjaan akhir tahun (*year-end work*) adalah pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai tiga bulan setelah tanggal neraca.

3) Pemanfaatan personal klien.

Personel klien dapat dimanfaatkan untuk berbagai perikatan, yakni :

- a) Pembuatan saldo akun buku besar.
- b) Rekonsiliasi akun kontrol dalam buku besar dengan akun buku pembantu yang bersangkutan.
- c) Pembuatan daftar umur piutang.
- d) Pembuatan daftar piutang wesel dan penambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit.

d. Gangguan Terhadap Independensi Auditor

Dalam standar umum kedua (SPKN 2007) menyatakan, “dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari sikap mental dan penampilan dan gangguan

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi”. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus memberlakukan independensi menurut Standar Pemeriksaan kepada tenaga ahli dan memperoleh representasi dari tenaga ahli tersebut mengenai independensi tenaga ahli. Menurut (SPKN 2007), pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi yakni sebagai berikut :

1) Gangguan pribadi.

Sebelum auditor melakukan proses pengauditan, organisasi pemeriksa terlebih dahulu harus memperhatikan dan memeriksa apakah auditor memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dapat disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi yang mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahnya temuan dalam segala bentuk.

2) Gangguan ekstern.

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pengauditan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau kesimpulan hasil pengauditan secara independen dan objektif. Auditor harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pengauditan dan melaporkan temuan audit, pendapat dan kesimpulan secara objektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut.

3) Gangguan organisasi.

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Apabila auditor melakukan

pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja, maka auditor dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi. Dalam melaksanakan pengauditan, organisasi harus bebas dari hambatan independensi.

3. Profesionalisme Auditor

Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Seseorang yang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya. Artinya profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, Arens (2008:105).

Seorang akuntan yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya. Menurut Hall (1968) yang dikutip oleh Hastuti dkk (2003), dan Elfitria (2007) menyatakan bahwa profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai akuntan publik. Gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu antara lain :

a. Pengabdian Pada Profesi.

Pengabdian terhadap peraturan profesi dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang

dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Seorang auditor bekerja sesuai komitmen yang telah dibuatnya, sehingga auditor memiliki sebuah kepuasan batin tersendiri dari hasil yang dicapai atas pelaksanaan audit yang dilakukan. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan dan merupakan suatu komitmen pribadi yang kuat, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengauditan. Dengan totalitas yang dimiliki, auditor akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menentukan tingkat materialitas agar tidak salah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan laporan keuangan hasil auditan.

b. Kewajiban Sosial.

Kewajiban sosial merupakan suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun kalangan profesional lainnya karena adanya pekerjaan tersebut. Sikap profesionalisme dalam pekerjaan tidak terlepas dari kelompok orang yang menciptakan sistem suatu organisasi tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Pekerjaan ini dibuat dengan perencanaan yang matang termasuk didalamnya perencanaan tentang materialitas. Sebagai profesional, auditor mengakui tanggung jawabnya

terhadap masyarakat, klien, dan rekan seprofesi, serta berperilaku yang terhormat, sekalipun itu berarti pengorbanan pribadi.

Auditor juga mempunyai peran dalam perekonomian suatu negara, sehingga perlu disediakan laporan keuangan yang andal, yang memungkinkan para investor memutuskan ke usaha-usaha apa dana mereka investasikan. Dengan demikian masyarakat memerlukan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi ekonomi (Mulyadi dalam Hastuti 2003).

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seorang auditor yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Banyak orang yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak bagi mereka, dan hak istimewa untuk membuat keputusan-keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Rasa kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas. Kemandirian yang sudah terwujud dalam diri auditor akan terwujud pula di dalam proses pengauditan. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat benar-benar berdasarkan kondisi

dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan, sehingga benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

d. Hubungan Dengan Sesama Profesi.

Hubungan antara sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengenai prinsip-prinsip perilaku profesional seorang auditor. Profesionalisme auditor akan meningkat jika menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Kesadaran profesional dapat ditingkatkan melalui ikatan profesi antar sesama akuntan. Dengan banyaknya saran dan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh sesama auditor, akan menambah pengetahuan auditor, sehingga lebih bijaksana dalam menetapkan perencanaan dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengauditan. Dengan sering berkumpul dan berdiskusi dengan sesama profesi akan mendapat banyak masukan dari mana sumber yang lebih profesional lagi.

e. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi.

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan profesional atau tidak adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan tersebut. Keyakinan akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan hasil penilaian seta pertimbangan-pertimbangan yang dibuat akan memberikan hasil yang berbeda. Bila yang menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat diketahui.

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga karakteristik, yaitu :

- a. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.
- b. Melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan.
- c. Menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan.

Dalam (SPKN 2007), yang disampaikan pada standar umum pertama yakni “pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Selanjutnya pada pernyataan standar umum ketiga menyatakan “dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama”. Hal ini sangat bertujuan supaya auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan dapat menyampaikan dengan objektif bila terdapat salah saji material.

Misalnya kecermatan dan keseksamaan profesional meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang lengkap. Sebagai seseorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan kekhilafan yang terjadi selama proses audit berlangsung sehingga terdapat informasi yang sempurna. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan fungsinya, antara lain melalui pendidikan dan latihan

penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat kontinyu. Adapun ciri-ciri profesi yang dikemukakan oleh Harahap dalam Elfitria (2007) adalah :

- 1) Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
- 2) Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
- 3) Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
- 4) Keahliannya dibutuhkan masyarakat.
- 5) Bekerja bukan dengan motif komersil, tetapi didasarkan pada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Auditor harus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga mereka accountable baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu, pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak diperlukan baik menyangkut komputerisasi data, kompleksitas transaksi, pendekatan terbaru di bidang audit maupun perubahan di bidang keuangan. Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan berkaitan dengan dua aspek (M.Dan, 2002) yaitu :

- a. Aspek struktural, merupakan bagian dari pembentukan asosiasi profesional, pelatihan-pelatihan dan pembentukan kode etik.
- b. Aspek sikap, berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Aspek-aspek tersebut dikembangkan dalam skala sikap untuk mengukur tingkat profesional auditor dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Prinsip perilaku yang profesional yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

4. Penelitian yang Relevan

Penelitian Elfitria (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap penetapan tingkat materialitas audit laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Padang dengan responden sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dalam dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan profesionalisme auditor dalam dimensi hubungan dengan sesama profesi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Risty (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada 18 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Semarang, dengan responden sebanyak 238 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

Penelitian Hastuti,dkk (2003) mengenai hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik, dengan responden sebanyak 244 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan.

B. Kerangka Konseptual

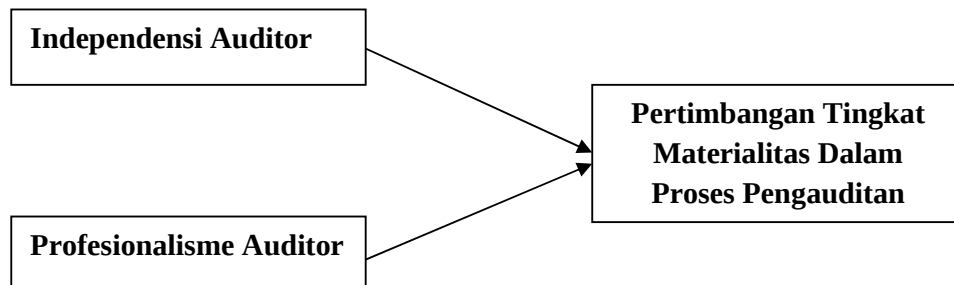
Pertimbangan tingkat materialitas merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan untuk menentukan seberapa salah saji yang terjadi dalam suatu laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas penyajian laporan keuangan. Pada awal perencanaan audit, auditor harus membuat pertimbangan terlebih dahulu mengenai tingkat materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan untuk merencanakan sifat, penetapan waktu, dan luas prosedur audit secara memadai. Auditor harus mengevaluasi apakah salah saji yang disengaja dan sering terjadi akan menyebabkan laporan keuangan secara keseluruhan mengandung kesalahan yang material. Disinilah tingkat profesionalisme dan independensi auditor dibutuhkan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit.

Auditor yang independen akan merumuskan dan menyatakan pendapat dengan jujur, sesuai fakta dan bukti yang ada serta tidak memihak, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan auditan lebih akurat dan objektif. Seorang auditor yang independen akan memperhatikan dengan jelas temuan-temuan yang ada dan informasi yang disajikan, apakah terdapat salah saji yang material dalam proses audit. Oleh karena itu, cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas yang bebas dari salah saji yang material, diperlukan sikap independen dari auditor. Apabila auditor kehilangan independensinya, maka penetapan tingkat materialitas pada laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Independensi merupakan salah satu syarat utama bagi seorang auditor, supaya laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan yang material, serta auditor dapat menentukan dengan tepat seberapa besar salah saji yang terjadi dalam suatu laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas penyajian laporan keuangan. Jadi, independensi auditor berpengaruh cukup signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

Supaya dapat melaksanakan tugas secara profesional, auditor harus membuat perencanaan sebelum melaksanakan proses pengauditan laporan keuangan. Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan dikatakan mengandung salah saji material, apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individu atau keseluruhan cukup signifikan, sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan

tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Salah saji dapat terjadi akibat penerapan yang keliru dari prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan, pengalaman auditor baik secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan penting. Gambaran seseorang auditor yang profesional dapat dicerminkan melalui lima dimensi profesionalisme yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi dan keyakinan terhadap peraturan profesi, sehingga auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material.

Jadi seorang auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan independen, akan mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan kliennya, serta memperhatikan dengan jelas apakah laporan keuangan mengandung salah saji material, supaya laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan kepada auditor bebas dari kesalahan yang material. Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan:



Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan yakni:

H₁ : Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

H₂ : Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana independensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Independensi auditor tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
2. Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan pada auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 62,9%. Sedangkan 37,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh dari pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.

2. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Auditor hendaknya bebas mengkomunikasikan hasil audit yang ditemukan kepada pihak manajerial sesuai dengan fakta yang diperoleh. Selain itu auditor juga harus bebas dari campur tangan manajerial dalam menentukan, mengeliminasi dan memodifikasi bagian-bagian yang diperiksa. Independensi auditor perlu ditingkatkan agar dalam mempertimbangkan tingkat materialitas selama proses pengauditan berlangsung, auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan manapun, sebab jika demikian, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Hal ini sangatlah penting diperhatikan mengingat karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.
2. Auditor hendaknya tetap teguh pada profesinya meskipun mendapat tawaran pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih besar, serta memiliki totalitas dalam pekerjaannya. Selain itu profesi eksternal auditor merupakan salah satu profesi yang menciptakan transparansi dalam

masyarakat. Para auditor diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, karena dengan kemampuan profesional auditor yang tinggi akan dapat meningkatkan kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan kliennya.

3. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan. Sampel dalam penelitian ini juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Insurance Pendekatan Terintegrasi..* Alih Bahasa Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ari Fatmawati. 2008. *Hubungan Antara Independensi Auditor dengan Kualitas Audit atas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X*, Juli, hlm 21-51.
- Boynton, William C. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Elfitria Rahman. 2007. *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Penetapan Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.*
- Eunike Christina Elfarini. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.*
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Semarang: Universitas Dipenegoro.
- Hastuti, T.D, S.L Indriantoro dan C. Susilawati. 2003. *Hubungan Antara Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI*, Oktober, hlm 1206-1220.
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Messier, F. William, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt. 2006. *Auditing & Assurance Services*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- M Dan, G. 2002. *Auditing*. Jakarta: Erlangga.